

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Trasisi politik yang terjadi di Indonesia menimbulkan dua proses politik yang berjalan secara simultan, yaitu demokrasi dan desentralisasi. Kedua politik yang demikian dapat terlihat dalam pergeseran format pengaturan politik di area lokal ataupun nasional, yakni dari pengaturan politik bersifat otoriter-sentralistik menjadi demokratis-desentralistik (Jurnal Dwi,2013).

Menurut Dwipiyana didalam jurnal (Pemilihan 2013) desentralisasi memungkinkan keberlangsungan perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan pusat dan daerah, sehingga memperoleh keleluasaan untuk menghasilkan keputusan politik tanpa intervensi pusat. Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan,desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara Pusat dengan Daerah, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan

Transisi politik yang dimaksudkan tentu adalah pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, sebagaimana diubah oleh UU No. 32 Tahun 2004, dan sebagaimana diubah kembali oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seperti diketahui bahwa hakikat diberlakukannya otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dalam pembangunan nasional.

Pada perkembangannya, semangat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui otonomi daerah tersebut kemudian dikembangkan dalam sistem otonomi desa melalui penetapan

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Otonomi desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang terbentuk bersamaan dengan terbentuknya persekutuan masyarakat hukum tersebut, dengan batas-batas berupa hak dan ketentuan yang belum diatur oleh persekutuan masyarakat hukum yang lebih luas dan tinggi tingkatannya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan kesatuan masyarakat hukum bersangkutan. Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah.

Kewenangan yang dimiliki desa menurut Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kepala Desa merupakan pemimpin pemerintahan yang ada di desa. Kemajuan dari sebuah desa bergantung pada kinerja dari pemimpin atau kepala desa tersebut. Kepala desa bertanggung jawab penuh atas desa yang dipimpinya, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan. Selain itu, kepala desa juga bertanggung jawab mengembangkan kemandirian serta potensi desa. Peran kepala desa sangatlah penting dalam program pelayanan publik di Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran kepala desa diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di desa serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah masing-masing guna mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia,

Di Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo memiliki sistem kepemimpinan demokrasi yang dikepalai oleh Kepala Desa dalam memperoleh kesejahteraan masyarakat. Demokrasi tersebut sudah berlangsung pada Kepemimpinan Kepala desa pertama Bapak Sodikoro sampai Bapak Baskoro Widha Mandala S.Sos.

Pada Kepemimpinan yang berlangsung saat ini Baskoro Widha Mandala S,Sos Mendapat kepercayaan dari masyarakat sekitar Karena memiliki Ayah juga Mantan Lurah Desa Gondowido dua Periode Tahun 1982-2002 Supriadi. Kepercayaan sangat penting artinya bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Kotler dan Keller (2012) kepercayaan adalah kesediaan perusahaan untuk bergantung pada mitra bisnis. Kepercayaan tergantung pada beberapa faktor antar pribadi dan antar organisasi seperti kompetensi, integritas, kejujuran dan kebaikan hati. Membangun kepercayaan bisa menjadi hal yang sulit dalam situasi online, perusahaan menerapkan peraturan ketat kepada mitra bisnis online mereka dibanding mitra lainnya.

Kepercayaan (trust), baik dalam bentuk sosial maupun politik adalah sineqna non (syarat mutlak) pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik dan kepercayaan yang saling membutuhkan satu sama lain, kepercayaan menumbuhkan tata pemerintahan yang baik. Tiga mekanisme penyebab utama yang beroperasi antara kepercayaan dan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu :

- a. Mekanisme kausal sosial kemasyarakatan,
- b. Mekanisme kausal ekonomi efisiensi,
- c. Mekanisme kausal politik legitimasi pemerintahan demokratis
melahirkan kepercayaan, (Juanda Nawawi,2012)

Kepercayaan merupakan prasyarat bagi tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan pentingnya hubungan sosial kemasyarakatan antara kepercayaan dan pemerintahan yang baik melibatkan utamanya membangun dan memelihara semangat masyarakat sipil. Pada kepemimpinan Bapak Baskoro Widha Mandala S.Sos Merupakan Kepala Desa yang di hormati karena Mekanisme kausal Sosial Masyarakat Sering melakukan bakti sosial dan juga sering menggunakan dana Pribadi untuk memajukan Desa Tersebut, Oleh karenanya mendapatkan Kepercayaan Kepemimpinan dari Masyarakat. Pada tahun 2018 Beliau masih menjabat sebagai PNS Kelurahan Babadan Kab.Madiun dan Untuk keperluan Pemilihan Kepala Desa mengharuskan Cuti dari masa kedinasan PNS. Dalam uraian di atas

Kepala Desa Gondowido tahun 2019 Berjalan Di selenggarakan tepat pada tanggal 20 Mei 2019. Pemilihan tersebut di selenggarakan secara serentak yang di ikuti dari 198 Desa. Pada saat itu saudara Baskoro Widha Mandala, S.Sos di pilih Karena pada waktu dahulu Bapak Supriadi adalah bapak dari beliau sendiri, beliau dahulu pernah menjabat sebagai kepala desa pada periode 1982 -2002, dari situ masyarakat ingin mencari bibit yaitu dari anak beliau sendiri yang pada saat itu masih menjabat sebagai PNS. Bukan hanya menjabat sebagai PNS namun Kepala Desa Gondowido adalah seorang Pengusaha yang membidangi beberapa usaha, Seperti Perhotelan di Ngebel dll, di mata masyarakat sangat di hormati karna beliau sendiri juga memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap masyarakat, Tentu saja ada Proses Pada saat pemilihan Kepala Desa Baru tersebut terlepas dari pesaingnya yang juga mantan Kepala Desa Periode 2012-2017 yang membatalkan pecalonan Kepala Desa, Atas dasar permasalahan itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat Judul tentang Faktor-Faktor Keberhasilan Pemilihan Kepala Desa Calon Tunggal Pada Tahun 2019 Di Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian yang telah peneliti paparkan dalam latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah :

Apa yang menyebabkan Keberhasilan Pemilihan Kepala Desa Pada Tahun 2019 di Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Keberhasilan Pemilihan Kepala Desa Pada Tahun 2019 Di Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

1.4. Manfaat Penelitian

Disamping Tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka hasil kegiatan penelitian juga diharapkan mempunyai manfaat. Diharapkan penelitian ini dapat :

- a. Peneliti sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai sentra ide sama dengan demikian dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik dan ilmu pemerintahan pada khususnya;
- b. Bagi lembaga terkait hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai faktor keberhasilan calon pemilihan kepala Desa di Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.
- c. Bagi mahasiswa, Hasil Penelitian ini bisa digunakan untuk menambah pengalaman dan wawasan dimasa depan serta untuk menyelesaikan tugas akhir diperkuliha

1.5. Pengesahan Istilah

1.5.1. Keberhasilan

Keberhasilan adalah perihal (keadaan) berhasil. Keberhasilan berasal dari kata dasar hasil. (KBBI Online 30-7-2020).

1.5.2. Pemilihan

Adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok di mana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan administrasi (Wikipedia Online 2020).

1.5.3. Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Desa, dalam struktur organisasi pemeritahan desa, “Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desatertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6

(enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan 10 terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain. “Menurut Widjaja (2008:27) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya”.

1.5.4. Desa

Desa merupakan kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat dan mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi bukan hanya suatu tempat kediaman masyarakat namun terjadi disuatu induk desa dan beberapa kediaman. Desa sendiri berasal dari bahasa idiah yakni swadesi yang artinya tempat asal, tempat Negeri asal, atau tanah leluhur yang menunjukan pada suatu kehidupan, dengan suatu norma, serta memiliki batasan yang jelas. Karakteristik masyarakat desa pada beberapa keputusan luar masyarakat kota merupakan kajian yang saling kait-mengkait dan mereka mengistilahkan rural community untuk masyarakat kota. Perbedaan berdasarkan pada oleh letak tinggal geografis dan kebiasaan serta karakteristik yang keduanya memandang beda. Soedjono Soekanto (1999) mengemukakan bahwa konsep community merujuk pada konsep lokalitas atau masyarakat yang memiliki wilayah dan adat setempat.

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Teori Partisipasi

Teori partisipasi adalah pelaksanaan suatu kegiatan tidak terlepas dari suatu tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang akan dicapai harus ada dukungan serta keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan merupakan partisipasi seseorang yang patut dihargai, serta diharapkan ada manfaat serta tujuan atas keikutsertaan tersebut. Partisipasi ditandai dengan keterlibatan seseorang dalam suatu kelompok baik moral maupun materi serta adanya rasa tanggungjawab. Menurut Kaffler yang dikutip oleh Mulyono mengenai partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan yang mencurahkan baik fisik maupun mental dan emosional. Partisipasi fisik merupakan partisipasi yang langsung ikut serta dalam kegiatan tersebut, sedangkan partisipasi secara mental dan emosional merupakan partisipasi dengan memberikan saran, pemikiran, gagasan, dan aspek mental lainnya yang menunjang tujuan yang diharapkan. (Alaudin 2015: 16). Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokratis dimana orang dilibatkan dan diikutsertakan dalam perencanaan serta pelaksanaan serta ikut bertanggung jawab sesuai tingkat kewajiban.

a. Partisipasi Politik

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih Pemimpin Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Norman H. Nie dan Sidney mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan peribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyaknya langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi Pejabat Negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. (Naswin 2009:188).

b. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat diwujudkan kedalam berbagai bentuk atau sikap, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah, kampanye pada saat menjelang pemilihan, mencari dukungan untuk seorang kandidat dan lain-lain.
- *Lobbying* mencakup upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi elitelitpolitik dengan maksud memengaruhi keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan yang melingkupi pemilihan.
- Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi-organisasi massa, baik yang berada dalam posisi partai ataupun tidak. Dengan tujuan utama mendukung salah satu pasangan calon.
- Mencari koneksi merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap elitelit politik daerah/pusat dan biasanya memperoleh manfaat bagi hanya satu orang.
- Tindakan kekerasan: Demonstrasi yang dibarengi dengan tindakan destruktif dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi politik, karena dengan tindakan kekerasan bisa juga mempengaruhi pengambilan keputusan pejabat terkait (KPUD bahkan Kepala Daerah terpilih).

Menurut **Milbrath dan Goel (2012)** dibagi empat kategori, yakni :

1. Apatis, orang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Speaktator, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Gladiator, mereka-mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik dan terakhir.

4. Pengkritik, yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional. Meminjam istilah **Myron Weiner**, sehingga yang terjadi adalah irasional perilaku politik masyarakat. Hal yang lain menyebabkan irasionalnya perilaku

c. Perilaku Politik

Secara umum perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik, perilaku politik juga termasuk kegiatan masyarakat dalam proses meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, serta mengembangkan kekuasaan. Pengertian lain perilaku politik adalah semua perilaku manusia baik sebagai individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, konflik, kebaikan bersama, serta kekuasaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik sebagai berikut:

- Lingkungan sosial politik langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa.
- Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk keperibadian aktor seperti, keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan.

Lingkungan sosial politik langsung berupa situasi yaitu keadaan melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, dan ancaman dalam segala bentuknya (Naswin 2014: 144). Image seorang calon lahir akibat penilaian masyarakat. Penilaian itu dilakukan secara ex-post dan bukan ex-ante, penilaian ex-post berarti masyarakat menilai apa-apa saja yang telah dilakukan seorang calon. Dalam banyak penelitian ditemukan bahwa membangun image membutuhkan waktu lama, dan konsistensi yang tinggi supaya bisa terus-menerus berkenaan dihati masyarakat (J.Prihatmoko 2011).

1.6.2. Teori kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. menurut Robbins dan Judge (2013) adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau sebuah tujuan yang ditetapkan. menurut Suwanto (2016) tipe kepemimpinan adalah sebagai berikut :

a. Kepemimpinan Demokratis

Pimpinan selalu mengadakan musyawarah dengan bawahannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. sehingga bawahannya merasa dihargai. dengan demikian bawahan bergeraknya itu karena rasa tanggung jawab. dan timbul atas rasa kesadarannya masing – masing.

b. Kepemimpinan Bakat

Pimpinan bisa menggerakkan bawahannya karena mempunyai bakat itu. sehingga bawahannya senang mengikutinya. jadi ini lahir karena pembawaannya sejak lahir seolah – olah ditakdirkan untuk memimpin dan diikuti oleh orang lain.

c. Kepemimpinan pribadi (personal leadership)

pimpinan mengadakan hubungan langsung dengan bawahannya. sehingga timbul hubungan pribadi yang baik.

d. Kepemimpinan kepatuhan

pimpinan memerlakukan bawahannya seperti anak sendiri, sehingga para bawahan tidak berani mengambil keputusan, segala sesuatu diserahkan kepada bapak pimpinan untuk menyelesaikannya.

1.6.3. Teori Demokrasi

Esensi Demokrasi adalah partisipasi publik dalam menentukan pejabat-pejabat politik dan dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam pandangan Resseau, demokrasi tanpa partisipasi langsung oleh rakyat merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri. Affan Gaffar mengemukakan bahwa dalam politik dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi yaitu pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik. Untuk pemahaman yang kedua dikenal dengan istilah procedural democracy. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang hendak dilakukan/ diselenggarakan oleh sebuah negara seperti dalam ungkapan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ungkapan normatif tersebut biasanya termuat dalam konstitusi masing-masing negara seperti dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pandangan demokrasi dalam contoh empirik adalah musyawarah mufakat. Sedangkan Robert A. Dahl mengemukakan bahwa sistem yang demokratis ditentukan dengan syarat sebagai berikut:

- Akuntabilitas, dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.
- Rotasi kekuasaan dalam demokrasi, pemegang kekuasaan tidak menjalankan kekuasaannya secara terus menerus dalam waktu yang lama, terdapat suatu sistem pemilihan umum yang menyebabkan adanya rotasi kekuasaan di negara tersebut.
- Rekrutment politik yang terbuka daalam demokrasi, terdapat suatu rekrutmen politik yang transparan bagi masyarakat. Untuk tercapainya syarat ini maka suatu sistem pemilihan umum secara langsung menjadi syarat untuk terpenuhinya suatu rekrutmen politik yang terbuka.

- Pemilihan umum yang jujur, dalam demokrasi, pemilihan umum yang dilaksanakan adalah pemilihan umum yang jujur, tanpa rekayasa dan hasil dari pemilihan umum benar-benar merupakan hasil yang berasal dari suara rakyat.
- Menghormati hak-hak dasar, dalam demokrasi, seluruh penyelenggara negara dan pemerintahan memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara antara lain hak memperoleh penghidupan layak, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh pendidikan dan hak-hak dasar lainnya.
- Persamaan dalam hak politik, dalam demokrasi, harus terdapat persamaan dalam penyaluran hak-hak politik dari warga negara.

a) Definisi Demokrasi

Demokrasi berasal dari perkataan Grika, demos berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan/kedaulatan. Demokrasi menurut akar kata itu berarti pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat banyak³². Menurut mantan Presiden Tanzania, Julius Nyerere, definisi demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat (government of the people), oleh rakyat (government by people), dan untuk rakyat (government for people). Dan demokrasi dalam sisi lain yang dikemukakan oleh Abdulrahman Wahid (Gusdur) bahwa demokrasi sejati adalah demokrasi yang melindungi dan membela hak-hak minoritas, pemerintahan menjadi tidak demokratis apabila memenuhi aspirasi mayoritas, memihak mayoritas adalah sektarianisme dan membela minoritas adalah demokrasi (Irfan 2019 : 144).

b) Prinsip Demokrasi

Suasana kehidupan yang demokrasi merupakan dambaan bagi umat manusia termasuk Warga Negara Indonesia karena pada prinsipnya menurut Inu Kencana yaitu:

1. Adanya pembagian kekuasaan,
2. Adanya pemilihan umum yang bebas,
3. Adanya manajemen terbuka,
4. Adanya kebebasan individu,
5. Adanya peralihan yang bebas,
6. Adanya pengakuan hak minoritas,
7. Adanya pemerintahan yang berdasarkan atas hukum,
8. Adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggung jawab.

Prinsip pembangunan demokrasi politik desa adalah untuk mewujudkan sebuah pemerintahan desa yang demokratis dilakukan dengan menjalankan 3 prinsip demokratisasi desa yakni Pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang dalam menentukan siapa yang berhak menduduki kursi di lembaga politik negara, legislatif dan eksekutif (Kurniawan 2009):

1. Prinsip-prinsip demokrasi Partisipasi yakni dalam pengambilan suatu keputusan yang di ambil dalam pemerintahan harus dengan persetujuan rakyat desa.
2. Pertanggungjawaban yakni dengan semua lembaga yang ada dalam pemerintahan desa harus bertanggungjawab kepada masyarakat desa.
3. Keadilan, yakni pemerintahan harus dapat berdiri diatas semua golongan tanpa adanya diskriminasi dalam menjalankan pemerintahan

1.7. Definisi Operasional

Untuk menganalisis Proses Pemilihan Kepala Desa Gondowido Kecamatan Negebel Kabupaten Ponorogo, dengan rumusan masalah yang peneliti paparkan diatas maka :

Mengetahui Keberhasilan Kepala Desa

1) Partisipasi

Umumnya partisipasi calon kepala Desa cenderung sering dilakukan guna memperoleh sura di lingkungan masyarakat Desa sekitar dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh calon tersebut. Indikatornya adalah :

- Kampanye
- Lobbying
- Kegiatan Organisasi
- Koneksi

2) Mengetahui Demokrasi

Partisipasi publik dalam menentukan pejabat politik dan dalam pembuatan kebijakan publik. Demokrasi tanpa partisipasi langsung oleh rakyat merupakan bentuk peningkatan terhadap demokrasi itu sendiri. Indikatornya adalah :

- Akuntabilitas
- Rotasi Kekuasaan
- Rekrutmen Politik
- Pemilihan Umum yang jujur
- Menghormati hak-hak dasar
- Persamaan dalam hak politik

3) Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Indikatornya adalah :

- Kepemimpinan pribadi
- Kepemimpinan Bakat
- Kepemimpinan kebabakan
- Kepemimpinan demokratis

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Lokasi Penelitian

Dilaksanakan di Desa Gondowido, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Hal ini dikarenakan ingin mengkaji tentang Proses

pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo . Dengan asumsi tokoh calon Kepala Desa yang justru diminati oleh masyarakat sehingga tokoh tersebut tidak mampu menolak permintaan masyarakatnya. Dari peristiwa itulah sehingga sangat menarik untuk dijadikan sebagai penelitian disana.

1.8.2. Jenis Penelitian

Menggunakan pendekatan kualitatif, Moleong (2010:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya motivasi, persepsi, tindakan dan lain-lain secara holistic dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata secara alamiah dan memanfaatkan metode alamiah. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis dan tidak memerlukan angka-angka, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Dalam penelitian ini, menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena ingin menjelaskan tentang Proses pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo .

1.8.3. Teknik Penentuan Informan

Dalam Penentuan informan menggunakan Purposive Sampling, Menurut Jogiyanto (2014) teknik pengambilan sampel (purposive sampling) teknik pengambilan informan yang dilakukan dengan mengambil informan berdasarkan orang yang mengetahui. Teknik purposive sampling merupakan pengambilan informan dengan adanya tujuan tertentu dan bukan didasarkan atas strata, random, atau geografi, Sugiyono (2015) mendefinisikan purposive sampling sebagai teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini mengambil informan yaitu :

No.	Informan	Jumlah Orang
1.	Kepala Desa Ngebel	1 Orang
2.	Panitia TPS	1 Orang
3.	Perangkat Desa	1 Orang
4.	Tokoh Masyarakat	3 Orang
Jumlah		6 Orang

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan). Penulis melakukan wawancara langsung dengan salah satu orang Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Gondowido calon kepala desa, dan beberapa orang anggota masyarakat yang menggunakan hak suaranya dalam pemilihan kepala desa, berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara untuk mencari, mengumpulkan, dan mempelajari dokumen-dokumen, surat-surat, catatan-catatan, buku-buku dan laporan-laporan tertulis yang ada serta berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji. Dokumentasi dalam Penelitian ini diperlukan untuk memperkuat data-data yang diperoleh dari lapangan yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berupa catatan tertulis dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Gondowido. Selain itu peneliti juga mencatat hasil wawancara dengan responden. Maka juga merekam hasil penelitian dalam bentuk foto-foto mengenai kegiatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

1.8.5. Analisis Data

Miles dan Hurbermen mengatakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilaksanakan sebagai interaktif dan berlangsung dengan terus menerus sampai selesai, sehingga datanya penuh. Kegiatan dalam menganalisis terdiri dari reduksi data, penyajian data pengambilan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti pada tahap ini melakukan penjajahan umum terlebih dahulu dengan melakukan observasi. Data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan terlebih dahulu dan mencatat secara teliti dan rinci atau dikelompokkan menurut variabel yang ada.

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu tahapan berfikir rentan yang membutuhkan kepintaran dan jangkauan serta wawasan yang luas. Proses mereduksi data, peneliti akan dituntut oleh tujuan yang harus dicapai. Proses ini dilakukan dengan meringkas, memilih informasi yang pokok, memfokuskan pada data penting, mencari tema dan strukturnya.

3. Penyajian Data

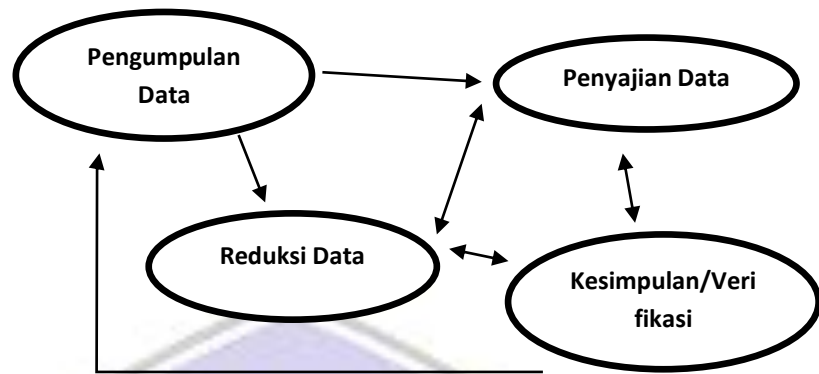
Penyajian data dibuat untuk mempermudah menekuni apa yang terbentuk dan menstrategikan kerja selanjutnya.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang diambil dari hasil reduksi data dan penyajian data merupakan kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara ini dapat berubah jikalau didapatkan bukti-bukti akurat lain pada saat tahap verifikasi data langsung.

Berikut skema proses dalam menganalisis data bentuk Miles dan Hurbermen :

Gambar. 1
Skema Analisis Data



(sumber : Miles dan Hurbeman)

